

PROBLEMATIKA DAN KONSEPSI KEMANDIRIAN PESANTREN SALAF

Mashur Imam¹, Moh. Hamzah²

¹ Sekolah Tinggi Islam Cendekia Insani Situbondo

² Institut Dirsosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenap

Email : Sajakimam@gmail.com¹, moh.hamzah.arsa@gmail.com²

Abstrak: Pesantren salaf selalu dioposisikan dengan arus globalisasi. Banyak yang menganggap mereka terpisah dari realitas. Walaupun demikian, keberadaannya hingga hari ini mengindikasikan mereka sanggup secara mandiri. Namun masih banyak kekurangan, yang dimungkinkan kemandiriannya tidak bertahan lama. Berdasar pada fakta artikel ini mengungkap bagaimana problematika dan konsep penting kemandirian pesantren salaf dicapai? Penelitian ini berjenis *library reseach*. Adapun konklusi dari penelitian adalah *pertama*, masalah laten yang dihadapi pesantren salaf adalah masalah kepemimpinan, pembelajaran, dan disorientasi peran sosialnya. *Kedua*, konsep kemandiriannya meliputi pendidikan, *life skill*, *leadership*, *entrepreneurship* dan kesadaran ikhtiar.

Kata kunci: *Pesantren;Salaf;Kemandirian;Problematik;Konsepsi*

PENDAHULUAN

Jika melakukan “*flash back*” sejenak kepada alur sejarah pendidikan Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa pesantren sebagai *local genius* dunia pendidikan nusantara hingga sekarang masih mampu menjelankan pendidikannya secara mandiri. Bukan hanya di dunia pendidikan, sejarah juga mencatat bahwa pesantren mampu secara penuh berperan aktif dalam perkembangan peradaban nusantara. Pada era penjajah, banyak pesantren yang ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Begitupun di era reformasi, pesantren juga tidak absen dalam menjaga gawang persatuan dan perkembangan bangsa ini. Eksistensi pesantren tidak lekang oleh waktu dan tidak dikubur zaman serta terus mengambil peran penting di tengah-tengah masyarakat.

Banyak tokoh yang mengagumi lembaga pendidikan pesantren. Beberapa pakar peneliti pesantren banyak yang membangun konklusi pengamatannya dengan menyebut pesantren memiliki peradaban yang sangat luar biasa. Martin Van Bruinnessen menilai pesantren memiliki perdaban mulya dan agung yang ia sebut sebagai tradisi agung (*great tradition*). Bahkan cendikian muslim nyang

tersohor, seperti Nurkholis Majid pernah secara ekstrem mengatakan bahwa seandainya dulu tidak ada penjajah, kemungkinan besar dunia pendidikan negeri ini akan mengikuti pola, model dan tradisi pesantren (Dawam Rahardjo, 1985;3). Lembaga pendidikan yang tersohor juga tidak mungkin seperti yang ada saat ini. Yang terkenal tidak mungkin lembaga-lembaga umum, akan tetapi lembaga-lembaga pendidikan pesantren. Pesantren sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Dengan kata lain, merupakan lembaga pendidikan yang tertua dan asli (*indegenius*) di tanah air (Ziemek, 1986;100).

Peran besar di atas tentu tidak lepas dari keistimewaan pesantren itu sendiri. Pesantren yang lahir jauh sebelum kemerdekaan telah membuktikan bahwa ia merupakan lembaga yang berdiri mandiri dengan kekuatan sendiri dan bertahan di berbagai rezim. Pesantren kuat tanpa penyangga eksternal atau institusi lain. Padahal setiap rezim di negeri ini memiliki intervensi kuat yang berpotensi merongrong peran lembaga tersebut, akan tetapi mereka tetap kuat mempertahankan tradisinya. Yang demikian ini, menurut Abdurahman Wahid adalah karena mereka menjaga posisi dengan pemerintah yang berkuasa. Di era kolonial, pesantren memilih jalan non koperatif dengan penjajah yang berkuasa.

Bahkan, berdirinya pesantren-pesantren di pedalaman tidak lepas dari strteginya untuk menjaga independensinya sebagai lembaga pendidikan agama yang memiliki pengaruh di masyarakat. Sebab sikap dan perilaku inilah beberapa pesantren sering mengalami teror dari penjajah. Tidak hanya mendapat teror berupa kebijakan yang tidak berpihak—tetapi lebih dari itu—teror berupa serangan senjata juga sering ditimpanya. Sebenarnya jika pesantren memilih koperatif pada penjajah, kemungkinan juga pesantren diistimewakan sebagai partner mereka. Ternyata, pesantren lebih memilih untuk mandiri demi menjaga tradisi dan tetap bersama rakyat membangun peradaban. Terus tumbuh berkembang dengan kemampuan yang dimilikinya sendiri. Tetap tegak mandiri sejak zaman pra penjajah, hingga pasca reformasi (Wahid, 2001;140-141).

Kuatnya kemandirian pondok pesantren tentu kerena akar berdirinya lahir dari gotong royong masyarakat. Secara psikologis, masyarakat memiliki rasa *belonging* yang kuat terhadap institusi pesantren. Yang demikian, selain disebabkan pesantren merupakan lembaga yang setia melayani masalah keagamaan, juga karena pesantren merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Tidak segan-segan msasyarakat menyumbangkan harta yang dimilikimnya, baik berupa uang bahkan tanahnya untuk pembangunan pesantren dan pengembangan pesantren di daerahnya (Oepen & Karcher, 1988;63). Arifin mengatakan bahwa pesantren adalah satu-satunya institusi yang didirikan oleh masyarakat secara ikhlas dan gotong royong. Seluruh pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikannya bersumber pada kemampuannya sendiri. Pada umumnya bersumber dari wakaf, hibah atau donasi dari santri sendiri. Dari hal inilah kemudian nampak bahwa pesantren memiliki karakteristik *selfstanding* (kemandirian) (M. Arifin, 1981;116).

Secara sosiologis, faktor dukungan dari masyarakat luas memang telah

mempermudah komitmen kemandirian pondok pesantren dalam arus perkembangannya, tetapi hal tersebut terancam rapuh pada era globalisasi dan modernisasi saat ini. Modernisasi merubah cara pandang pada semua aspek kehidupan masyarakat. Begitupun dengan globalisasi, membuat kehidupan mereka penuh ketergantungan. Pesantren dipaksa untuk memenuhi permintaan arus. Dominasi penguasa dan korporasi internasional membuat pesantren tidak berkuat. Ditambah lagi dengan mayoritas masyarakat yang mulai meninggalkan nilai luhurnya, membuat pesantren semakin tidak berdaya. Sikap utilitarianitas (diukur dari kebermanfaatannya) setiap individu kepada sesamanya tergerus dan hilang.

Kesukarelaan dalam mengabdikan tergantikan dengan sikap acuh tak acuh dan pragmatis. Sikap itulah yang kemudian menyebabkan mereka tidak berdaya untuk melawan arus. Pesantren yang memang hadir sebagai pelayan masyarakat, memiliki kegamangan dalam melayani keinginan masyarakat yang sudah dipengaruhi arus modernisasi. Pada sisi ini, sangat bersyukur jika masih ada pesantren yang tetap berkomitmen kuat untuk menjaga kemandirian dan tradisinya yang luhur, tetap mampu menjalankan kewajiban untuk melayani masyarakat.

Model pendidikan pesantren dipaksa untuk memenuhi kebutuhan era modern. Pendidikan tradisionalnya mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Beberapa pesantren salaf mulai banyak yang “gulung tikar” dan beberapa yang lainnya mulai mengembangkan pendidikan modern. Sebagaimana akibat modernisasi pada umumnya, pendidikan pesantren mulai meninggalkan ruh dan nilai-nilai luhur yang menjadi komitmennya sejak awal berdiri. Pendidikan yang awalnya berorientasi pada pencapaian nilai-nilai luhur kemanusiaan tergantikan model pendidikan yang orientasinya hanya pada pencapaian prestasi kuantitatif saja (A'la, 2006;5).

Disamping itu, modernisasi yang hanya menyisakan negara sebagai satu-satunya institusi yang berpengaruh di masyarakat, menyebabkan pesantren bertambah rapuh. Masih ditambah lagi dengan orientasi hidup masyarakat yang kesuksesan secara materi, membuat pesantren tidak punya pilihan. Pesantren terpaksa mengikuti kebijakan negara dengan mengadakan pendidikan formal yang tujuannya hanya mencetak lulusan untuk menjadi karyawan atau pegawai saja (A. Wahid, 1998). Secara filosofis masyarakat pesantren yang merupakan symbol tegaknya pendidikan Agama Islam bahkan sebagai symbol budaya yang asli Indonesia tidak akan memiliki peran signifikan pada era dewasa ini.

Banyak pesantren yang sudah memilih untuk mengikuti arus modernisasi dengan mengadakan sekolah-sekolah formal dan ikut serta dalam program dan aturan pendidikan negara yang positifistik. Alasannya selain karena kebutuhan zaman, juga karena semakin kuatnya kompetisinya antar lembaga pendidikan untuk berkompetisi, khususnya di bidang pemenuhan fasilitas pendidikannya. Pada era modern ini, standarisasi lembaga pendidikan dalam benak umumnya

masyarakat modern adalah tersedianya fasilitas belajar yang lengkap dan canggih. Pada konteks demikian, tentu yang sangat menjadi problem bagi dunia pesantren, khususnya bagi pesantren yang tetap ingin berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan secara mandiri dan tradisional.

Saat sikap pengabdian masyarakat kepada pesantren sudah melemah dan orientasi generasi muda sudah pada hal-hal yang bersifat pragmatis dan individualistis, tentu sangat sulit bagi pesantren salaf untuk bertahan pada komitmen kemandiriannya. Bagi pesantren yang memilih untuk tetap mandiri dan menjaga serta melastarikan pendidikan tradisional yang orientasinya pada keluhuran nilai, pastinya akan menghadapi masalah yang cukup berat. Dalam berjalannya waktu, pesantren-pesantren tersebut akan terancam kehilangan beberapa santrinya. Sebagaimana yang dijelaskan Steenbrink, ketika pesantren tidak mau beranjak ke modernitas, dan hanya berkuat dan mempertahankan otentisitas tradisi pengajarannya yang khas tradisional, dengan pengajaran yang melulu bermuatan al-Qur'an dan al-Hadis serta kitab-kitab klasiknya, tanpa adanya pembaharuan metodologis, maka selama itu pula pesantren harus siap ditinggalkan oleh masyarakat (Steenbrink, 1986;1999).

Selain akan ditinggalkan oleh masyarakat modern—sebagaimana yang dibahas sebelumnya—pesantren salaf dengan komitmen kemandirian tinggi juga akan mengalami kelemahan di sektor biaya operasional pengembangan pendidikannya. Hal ini tentu merupakan efek rasional yang mesti terjadi pada pesantren yang memilih untuk berkomitmen pada kemandirian institusinya. Sumber biaya penyelenggaraan pendidikannya lambat laun terus berkurang. Penyebabnya adalah *pertama*, kepedulian masyarakat yang semakin lemah. *Kedua*, semakin besarnya kecenderungan generasi muda meninggalkan pendidikan-pendidikan tradisional seperti pendidikan pesantren. *Ketiga*, komitmen kemandiriannya tentu menerima bantuan dari pihak lain, khususnya pemerintah. Pada intinya, jika ada pesantren yang terus bertahan pada komitmen kemandiriannya, maka pesantren tersebut merupakan pesantren yang luar biasa, karena masih tetap eksis dan mampu bertahan di tengah budaya yang memarginalkannya.

Melihat konteks di atas, tentu tidak heran jika pesantren akhir-akhir ini mengalami kemerosotan yang sangat signifikan. KH Achmad Sadid Jauhari menyoroti hal ini dan menuturkan bahwa dari beberapa penelitian tentang pesantren salaf memberikan konklusi yang mengharukan. Pesantren salaf mengalami problema serius dalam perkembangan kualitas dan kuantitasnya. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yakni banyaknya alumni pesantren yang mendirikan pesantren sendiri-sendiri dan tekanan ekonomi bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah.

Selain itu, bagi pesantren yang sudah mengalami regenerasi, umumnya kualitas pengasuhannya mengalami kemunduran, baik dari sisi keilmuan maupun keikhlasan. Banyak alumni pesantren masa kini yang kurang kuat terhadap godaan duniawi, sehingga kurang bisa mencerminkan akhlak yang baik yang

merupakan target utama produk pesantren. Hal ini juga terkait dengan keterlibatan para kiai dalam panggung politik praktis yang sering kali menimbulkan kesimpulan berbeda dari hasil *ijtihad siyasiy* mereka. Sehingga menyebabkan sebagian umat ada yang berburuk sangka dan tidak simpati lagi pada pesantren (Sadid Jauhari;2017).

Berdasarkan hal demikian di atas, penelitian terkait kemandirian penyelenggaraan pendidikan pesantren sangat menarik untuk diteliti. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa pesantren salaf tidak diminati oleh masyarakat modern, tetapi eksistensinya yang terus bertahan dan melayani pendidikan masyarakat tentu merupakan hal yang istimewa. Pesantren-pesantren salaf terus berkembang dari waktu ke waktu secara mandiri. Mayoritas pembiayaan, pengelolaan dan penyusunan kurikulumnya dilakukan dengan kemampuan yang dimilikinya. Penelitian fokus pada sejumlah literatur yang berhubungan dengan problematika dan konsepsi kemandirian pesantren salaf. Jadi kajian yang dilakukan berbentuk *library reseach*.

DASAR TEORI

Konsepsi Kemandirian Pendidikan

Kemandirian berasal dari kata mandiri dengan awalan *ke* dan akhiran *an*. Mandiri sendiri merupakan perkembangan kata dari kata diri. Jadi, maknanya tidak akan jauh dari kajian tentang perkembangan diri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Carl Rogers. Kemandirian bersumber dari kata *self* karena diri itu merupakan inti dari kemandirian itu sendiri (Ali & Asrori, 2011;109).

Selanjutnya makna tersebut diperjelasn oleh JP. Chaplin yang menulis kamus psikologi dan menjelaskan bahwa kemandirian berasal dari kata "*independence*" yang diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak tergantung pada orang lain dalam menentukan keputusan dan adanya sikap percaya diri (Chaplin, 2011). Yang perlu digaris bawahi ini adalah terkait dengan ketidak tergantungan pada orang lain. Artinya kemandirian adalah keterlepasan pada peran orang lain dalam melakukan sesuatu.

Agak senada dengan Parker yang mengistilahkan kemandirian sebagai *self reliance*. Maksudnya kemandirian adalah kemampuan untuk mengelola semua yang dimiliki, tahu bagaimana mengelola waktu, berjalan dan berpikir secara mandiri disertai dengan kemampuan mengambil resiko dan memecahkan masalah. Individu yang mandiri tidak membutuhkan petunjuk yang detail dan terus menerus tentang bagaimana mencapai produk akhir, ia bisa bersandar pada diri sendiri. Kemandirian berkenaan dengan tugas dan keterampilan bagaimana mengerjakan sesuatu mencapai sesuatu dan bagaimana mengelola sesuatu (Parker, 2005). Sebenarnya target pengolaannya adalah ingin menguatkan kualitas entitas besarnya untuk tidak tergerus dalam arus evolusi entitas ekseternalnya.

Ada banyak istilah yang berdekatan dengan kemandirian. Mislanya, ada

self efficacy yang lebih bermakna psikologis. Definisinya adalah keyakinan individu bahwa ia merasa mampu berpikir dan memotivasi sendiri dirinya untuk melakukan sesuatu. Ada yang yang disebut sebagai *self empowering*. Artinya mampu melakukan pemberdayaan sendiri. Dalam persepektif pengorganisasian kelompok sosial dapat dikatakan sebagai *community self-reliance* yang dilakukan sendiri yakni memberdayakan daya kelompok untuk terciptanya kemandirian bersama (Bandura, 1997).

Mayoritas pakar sebenarnya bersepakat bahwa ada tiga konsep istilah yang memiliki arti kemandirian, yakni *autonomy*, *independency*, dan *self-reliance*. *Autonomy* oleh Wolman diistilahkan dengan sebutan *autonomy drive*. Maksudnya, kemandirian adalah tendensi untuk mencapai sesuatu yang menjadi harapan sendiri. Menurutnya, tendensi tindakannya adalah dengan bersikap secara bebas dan original (Wolman, 1973). Artinya, kelompok dengan *autonomy* ini akan selalu bersikap bebas dan memiliki pengelolaan yang otentik. *Independency* menurut pendapat Bhatia, merupakan perilaku yang aktivitasnya diarahkan kepada diri sendiri, tidak mengaharapkan arahan. Bahkan, semua masalahnya akan dipecahkan oleh dirinya sendiri tanpa sedikit pun minta bantuan orang lain (Bhatia, 2016;554).

Pada pembahasan terkait kemandirian yang disebut sebagai *independency* ini, dalam pandangan pakar psikologi ada dua macam. *Pertama, volitional independency*. Orang yang mandiri secara *volitional* tidak akan bergantung kepada orang lain. Mereka lebih percaya pada kekuatannya sendiri. *Kedua, executive independency*. Kemandirian *executive* adalah melakukan tindakan dengan orientasi harapan dan kemauan yang ingin dicapai sendiri. Kedua tipe *independency* sama akan berguna pada terciptanya kemandirian yang utuh pada sebuah kelompok masyarakat (Berzonsky, 1981).

Secara mendasar, konsepsi kontruksi kemandirian merekomendasikan agar pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya lokal dengan mengacu kepada karakteristik spesifik yang dimiliki. Pembangunan sayogyanya diarahkan untuk meningkatkan kualitas tatanan yang indikator utamanya adalah terjaganya keadilan berpartisipasi bagi semua komponen tatanan serta meningkatkan kapasitas suatu tatanan (Berzonsky, 1981;19).

Pada aspek yang demikian di atas, konsepsi terminologi kemandirian ini berkaitan dengan isu-isu pengaturan organisasi menagamen komunitas sosial. Dalam hal ini bisa dihubungkan isu desentralisasi dan devolusi pada aspek pendidikan dewasa ini. Devolusi adalah pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat dari suatu negara berdaulat kepada pemerintah pada tingkat subnasional, seperti tingkat regional, lokal, atau negara bagian. Dalam hal pendidikan bisa diambil pengertian menyerahkan pengatuaran sekolah pada tingkat lokal. Adapun desentralisasi definisinya adalah adalah penyerahan Kekuasaan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat. Dalam aspek pendidikan tentunya adalah penyerahan kekuasaan manajemen untuk dirumuskan secara

mandiri sesuai lokalnya masing. Isu desentralisasi ini kemudian mendorong adanya konsepsi manajemen baru sebagai kemandirian dalam pendidikan.

Hal di atas sebagaimana yang dijelaskan David T Gamage dalam bukunya yang berjudul *Professional Development for Leaders and Managers of Self-Governing Schools*. Ia mengatakan bahwa kemandirian pendidikan adalah upaya menjawab perkembangan sosial politik yang berlangsung. Latar demikian ini yang sebenarnya mendorong lahirnya konsep manajemen pendidikan *Self Governing Schooll (SGS), school-based or site-based management (SBM)*(Gamage, 2006).

Berdasarkan penjelasan ini kemudian diperoleh sebuah pemahaman bahwa kemandirian merupakan kemandirian yang diupayakan oleh sebuah sub government. Dalam hal ini yang dimaksud bisa mengarah kepada sebuah komponen masyarakat dari sebuah pemerintahan. Pada isi konstruksinya dapat didekatkan pada kemandirin yang dilakukan oleh pesantren sebagai sub komponen masyarakat.

Konsepsi Pesantren Salaf

Pembahasan pesantren salaf sebenarnya merupakan pembasahan terkait dengan tipologi pesantren. Ada yang mengkalisifikasian pesantren yang dilakukan Zamakhsyari Dhofir terkait salaf dan pesantren modern itulah, yang menjadi awal kajian dua kategori pesantren ini berkembang dewasa ini. Pondok Pesantren *salaf* yaitu pesantren yang mempertahankan sistem pendidikan tradisionalnya. Tradisional yang dimaksud adalah bahan ajar, pengelolaan pendidikan dan seluruh sistem yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikannya(Bawani, 1993).

Pengertian tradisional menunjukkan bahwa lembaga ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan telah menjadi bagian yang mendalam dari sistem kehidupan sebagian besar umat islam di Indonesia yang merupakan golongan mayoritas bangsa Indonesia dan telah mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perjalanan umat bukan tradisional dalam arti tetap mengalami penyesuaian(Mastuhu, 1994).

Sedangkan kata salaf atau *salafiyyah* itu sendiri diambil dari numenkatur Arab *salafiyyun* untuk sebutan sekelompok umat Islam yang ingin kembali kepada ajaran Al- Qur.an dan Assunnah sebagaimana praktik kehidupan generasi pertama islam, pada waktu itu umat islam sedang mengalami perpecahan dalam bentuk golongan madzab tauhid hingga beberapa kelompok. Kelompok *salafy* mengaku lepas dari semua kelompok itu mengajak semua yang telah terkelompok-kelompok menyatu kembali kepada ajaran Al-Quran dan Assunah. Kata salaf juga dipakai untuk antonim kata kholaf, ungkapan ini dipakai untuk membedakan antara ulama slaf dan ulama kholaf. Tidak selamanya yang salaf berarti kuno manakala ulama mengajak kembali ke ajaran Al-Quran. Seringkali mereka lebih dinamis dari yang kholaf karena ulama kholaf banyak diartikan juga untuk menggambarkan ulama yang memiliki orientasi ke *salafussusholeh*(Hidayah, 2012).

Penggunaan kata salaf untuk Pondok pesantren yang terjadi di Indonesia sangat berbeda dengan makna asal katanya. Kata salaf pada pondok pesantren cenderung digunakan untuk menyebut pondok pesantren yang tidak menggunakan kurikulum modern, baik yang berasal dari pemerintah ataupun hasil inovasi ulama sekarang. Pondok Pesantren salaf pada umumnya dikenal dengan pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal semacam madrasah ataupun sekolah. Kalaulah menyelenggarakan pendidikan keagamaan dengan sistem berkelas kurikulumnya berbeda dari kurikulum, model sekolah ataupun madrasah pada umumnya. Jadi menurut penulis, pesantren salaf yakni pesantren yang melakukan pengajaran terhadap santrinya untuk belajar agama islam secara khusus tanpa mengikutsertakan pendidikan umum didalamnya. Kegiatan yang dilakukan biasanya mempelajari ajaran islam menggunakan kitab kuning atau kitab klasik (kuno), yang menggunakan metode tradisional seperti hafalan, menerjemahkan kitab dalam proses pembelajarannya.

Karakteristik Pondok Pesantren salaf tentu berbeda dengan Pesantren modern. Hal ini bisa di lihat karakternya yang, pertama, Pondok Pesantren salaf memiliki karakter lokalitasnya. Sebuah model pendidikan yang sejalan dan sedarah dengan fakta riil kondisi masyarakat sekitarnya. Kedua, di Pondok Pesantren salaf yang ditekankan ialah membangun kultur tanpa mesti membangun sistem. Ketiga, pondok pesantren salaf dikenal dengan pesantren yang memiliki pola pengelolaan pendidikan tradisional.

Selain itu juga dalam hal berpakaian, terlihat sangat sederhana dan madiri. Kesederhanaan pakaian dalam pondok pesantren salaf terlihat tidak membedakan antara pakain untuk berjamaah di masjid dan pakain untuk mengikuti kegiatan lainnya, termasuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di lingkungan pesantren tradisional, kecuali secara fisik geografis adalah daerah pedesaan, yang lebih memberikan ciri khas tradisionalnya ialah kecenderungan masyarakat setempat untuk melakukan tradisi, adat-istiadat dan amaliah keagamaan yang mencerminkan perilaku kelompok muslim tradisional. Seperti tradisi selamatan, sesaji, mempercayai pantangan-pantangan tertentu, upacara haul bagi leluhur yang dihormati, membaca *barzanji*, *manakib Abdul al-Qadir Jilani*, dan sebagainya (Bawani, 1993).

Adapun secara formal, dalam Permenag dikatakan bahwa pondok pesantren Salaf adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan kitab kuning dan sistem pengajaran yang ditetapkan oleh kiai atau pengasuh. Selain itu, pada surat keputusan bersama kementerian pendidikan agama dijelaskan bahwa pesantren salaf adalah pesantren yang juga diakui sebagai lembaga pendidikan tradisional yang diakui secara formal. Dengan surat ini, pesantren salaf telah memperoleh penyetaraan melalui SKB 2 Menteri (Menag dan Mendiknas) No : 1/U/KB/2000 dan No. MA/86/2000, tertanggal 30 Maret 2000 yang memberi kesempatan kepada pesantren salafiyah untuk ikut menyelenggarakan pendidikan dasar sebagai upaya mempercepat pelaksanaan program wajib belajar dengan persyaratan tambahan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA dalam kurikulumnya. Dengan demikian

SKB ini memiliki implikasi yang sangat besar untuk mempertahankan eksistensi pendidikan pesantren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji literatur yang berbicara tentang kemandirian pesantren. Ada dua hal penting yang akan dibahas yakni probelamatika yang terjadi konsepsi penting tetap urgen dalam kebertahanan pesantren salaf. Kedua hal ini akan diurai satu persatu dalam penelitian ini.

Problematika Kemandirian Pesantren Salaf

Ada berbagai macam hal yang dihadapi pondok pesantren sebagai konsekuensi pilihanya tentang kemandiriannya dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Pondok Pesantren yang tetap komitmen pada pendidikan tradisionalnya dan pesantren yang memilih untuk memodernisasi pendidikannya, sama-sama menghadapi probelematikan yang signifikan. Beberapa pesantren yang memilih menyesuaikan pada kebutuhan modernisasi masyarakat, mislanya mengalami masalah proses penyeimbangan pendidikan agamanya dengan pendidikan umum. Masuk pendidikan umum dalam dunia pendidikan pondok pesnatren menyebabkan peminimalan pendidikan agama di pondok pesantren. Hal ini menyebabkan lemahnya pendidikan agama yang dikuasai santri.

Begitupun halnya dengan pondok pesantren salaf, sistem pendidikan pondok pesantren khususnya pondok pesantren *salaf* berbeda dengan sistem pendidikan yang lain. Pondok Pesantren *salaf* seringkali dinilai sebagai sistem pendidikan yang "*isolasionis*" terpisah dari aliran utama pendidikan nasional dan konservatif. Artinya, pesantren salaf kurang peka terhadap tuntutan perubahan zaman dan masyarakat(Qomar, 2002;66). Selain memiliki efek positif seprtinya perannya sebagai ortodoksi Islam (I. Arifin, 1993), pondok pesantren salaf dianggap memiliki sisi buruk dalam kemandiriannya. Sebagai agen ortodoksi ajaran tradisional Islam, pondok pesantren salaf dianggap tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Dengan kata lain, cenderung memiliki sikap eksklusitas yang tinggi pada pemahaman baru yang berasal dari luar atau diluar dogma yang dikembangkan pesantren. Hal ini yang disebut-sebut sebagai tercerabutnya akar kepedulian pesantren pada problema sosial kemasyarakatan.

Problema di atas menyebabkan masalah-maslah lain muncul. Pondok Pesantren salaf dianggap pesantren yang kolot dan tidak mampu menjawab arus modernisasi global. Masyarakat malai memandang sebelah mata pada pesantren salaf. Akibatnya, beberapa masyarakat yang awalnya, mendorong putra-putrinya belajar di pesantren, akhirnya memilih pendidikan yang lebih menjanjikan bagi putra-putri mereka. Pada situasi ini, kemandirian pesantren pun mengalami masalah serius. Hilangnya ketertarikan masyarakat pada pondok pesantren salaf sama halnya dengan hilangnya dukungan pada pengembangan pesantren itu sendiri.

Kondisi tersebut akan mengakibatkan sumber pembiayaan, pengelolaan dan kependidikan pesantren semakin lama, semakin sedikit. Sebab, masyarakat sudah tidak begitu tertarik pada pesantren tradisional. Yang demikian ini, merupakan masalah terbesar yang dihadapi pondok pesantren salaf dalam mewujudkan kemandirian penyelenggaraan pendidikannya.

Pondok Pesantren salaf dipandang tetap berada pada lingkup yang kecil, padahal arus teknologi maju dengan amat pesatnya. Banyak pondok pesantren yang tetap bersikukuh mempertahankan ketradisionalannya dan cenderung menutup diri untuk dunia luar. Sehingga proses “tanggap perilaku” terhadap perubahan zaman sangat kurang dirasakan pada orientasi pendidikannya. Perkembangan pendidikannya masih jauh jika dibandingkan dengan pesantren-pesantren modern, baik dari segi kurikulum ataupun sistemnya. Dari segi kurikulum misalnya, pesantren ini lebih mencolok terhadap penekanan mengenai fiqih, tasawuf dan ilmu alat. Dalam sistem pembelajarannya, juga nampak masih mengikuti model-model terdahulu seperti *bondongan*, hafalan rutin, *sorong* dan metode kalsik yang lainnya. Akibatnya, orientasi keilmuan dipendidikan formal dinilai tidak berorientasi pada prestasi akademik dan kerja. Artinya, hanya tertuju pada prestasi akhlakul karimah. Pandangan-pandangan seperti inilah yang pada pertumbuhan dan kemandiriannya, diyakini dapat membuat kaum muslim lemah dan mengalami kemerosotan dalam segi ekonomi, teknologi dan juga pergeseran sosial di tengah-tengah masyarakat (Solihin, 2016).

Secara umum, ada beberapa hal yang menjadi problem serius yang dihadapi pesantren salaf dalam mengembangkan pondok pesantrennya secara mandiri. Adapun hal-hal itu merupakan stigma masyarakat pada umumnya yakni, *pertama*, dianggap eksklusif dan kolot dalam merespon modernisasi. Pada poin ini, masyarakat menilai pondok pesantren salaf seharusnya merubah paradigmanya agar tidak ditinggal oleh masyarakat modern. Sistemnya seharusnya berkembang dan diperbarui serah pada kebutuhan yang juga ikut berkembang. Perkembangannya dituntut untuk lebih ilmiah dan logis. Tentunya, dengan orientasi utama untuk memenuhi bekal hidup para peserta didiknya (Rofiq & Dkk, 2005).

Kedua, Lebih menekankan ilmu fiqh, tasawuf dan ilmu alat. Orientasi ilmu-ilmu yang diajarkan dianggap belum dapat secara rasional menjawab tantangan modernisasi. Dengan kata lain, pesantren salaf seharusnya dapat juga memberikan bekal kemampuan dan keahlian kerja pada peserta didiknya, agar mereka dapat bersaing secara profesiaonal di era modern ini.

Kempat, penurunan kualitas dan kuantitas pesantren salaf. Stigma ini bersumber pada anggapan awal bahwa pondok pesantren tradisonal tidak mampu menjawab penetrasi zaman. Hal ini yang kemudian mendasari klaim bahwa pondok pesantren tidak berkualitas, sehingga kuantitisnya pun semakin sedikit.

Kelima, penggunaan metode pembelajaran yang masih bersifat tradisional seperti sorongan, bandungan (*halaqah*), *weton*. Metode-metode klasik yang diterapkan dianggap usang dan perlu diperbarui, misalnya dengan menambahkan pelatihan ketrampilan dan lain sebagainya.

Keenam, Kurangnya penekanan kepada aspek pentingnya membaca dan menulis. Hal ini timbul dari dampak negatif dari metode yang masih klasik. Metode yang digunakan mengarah pada terbentunya peserta didik yang produktif (Ismail, 2013).

Stigma negatif pondok pesantren salaf, sebenarnya kesemuanya bersumber pada tidak terumuskannya secara efektif rencana pendidikan pesantren disusun. Terkait kurikulum yang dipakai misalnya, setiap pesantren berbeda-beda. Jadi tidak ada rumusan kurikulum yang baku di pondok pesantren. Kebijakan penyusunannya hanya berlandaskan pada segi intuitif pengelolanya. Dalam hal ini, M. Dawam Rahardjo menerangkan, bahwa persoalan tentang tidak adanya perumusan itu disebabkan karena tujuan itu diserahkan pada proses improvisasi menurut perkembangan yang dipilih sendiri oleh seorang kyai bersama stafnya secara intuitif (Dawam Rahardjo, 1985).

Pada intinya, problem utama pondok pesantren salaf adalah stigma tentang kahadirannya yang melawan arus modernisasi. Element-elemen pesantren salaf dianggap tidak bertindak dan berkarakter kontra modern. Pada sisi ini sebagaimana argummentasi yang diutarakan Rahmat yakni: *pertama*, kepemimpinan pesantren secara kaku masih terpola dengan kepemimpinan yang sentralistik dan hierarkis yang berpusat pada satu kiai. *Kedua*, pembelajarannya kurang adanya improvisasi metodologi. *Ketiga*, terjadinya di orientasi pondok yang tidak mampu mendefinisikan dan memosisikan dirinya di tengah realitas sosial yang berubah demikian cepat (Sudiby, 2010).

Elemen Penting Kemandirian Pesantren Salaf

Untuk mengupas masalah kemandirian pondok pesantren, alangkah lebih baiknya mengetahui lebih dahulu dengan cermat apa yang disebut sebagai kemandirian. Secara istilah, kemandirian pada Intisar dfinisinya adalah kemampuan membuat keputusan sendiri bagi dirinya. Akan tetapi kemandirian tidak sama dengan kebebasan mutlaq. Berkenaan dengan kemandirian dalam sebuah komunitas sosial, kemandirian dapat didifinisikan sebagai memperhitungkan semua faktor yang relevan dalam menentukan arah tindakan yang terbaik bagi semua yang berkepentingan.

Pendapat Ali Muhandi yang merujuk pada Hadari Nawawi menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang merupakan ciri kemandirian. Hal-hal tersebut adalah *pertama*, mengetahui secara tepat orientasi yang hendak dicapai. *Kedua*, percaya diri dan dapat dipercaya serta percaya pada orang lain. *Ketiga*, meyakini bahwa sukses adalah kesempatan bukan merupakan hadiah. Jadi untuk mencapainya harus dengan usaha diri sendiri yang maksimal. *Keempat*, memiliki

bekal pengetahuan dan keterampilan yang berguna. *Kelima*, mensyukuri nikmat Allah.

Pada konteks kemandirian pondok pesantren, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemandirian, faktor dari dalam (*intern*) dan faktor dari luar (*ekstern*). Faktor dalam berhubungan dengan spiritual pengelola atau seluruh civitas pesantren. Faktor luar yang mempengaruhi kemandirian adalah *social environment, politics environment, economic environment*, dan lain sebagainya. Dengan demikian kemandirian pondok pesantren dimaknai sebagai sikap yang tidak mengharapkan belas kasihan dan bantuan dari manapun, baik perorangan atau instansi. Artinya, pesantren mampu menyelenggarakan pendidikannya dengan karakter *self standingnya*. Pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan *non-profit* yang memiliki ciri khas berprinsip keikhlasan, kesederhanaan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kemandirian.

Menurut Martin Van Bruinessen, kemandirian lembaga pesantren menyimpan potensi penting bagi terwujudnya masyarakat sipil (*civil society*). Hal ini demikian, nampak sebagai ciri dari warga pesantren. Warganya memiliki kemandirian yang bebas dan egaliter, terutama dalam bertindak aktif membangun wacana dan praksis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan. inilah yang kemudian ia sebut sebagai “pilar demokrasi” di negeri ini (Marzuki dkk., 2021).

Potensi ini yang disebut Martin di atas, dewasa ini sangat signifikan. Pondok Pesantren salaf sebagai satu-satunya institusi yang memiliki orientasi utama menjaga moralitas bangsa, sangat relevan dilihat dari perannya pada era ini. Orientasi moralitasnya diharapkan dapat melindungi moralitas masyarakat dari sentuhan budaya imperialisme budaya (*cultural imperialism*) Barat terhadap budaya-budaya lain, yang melanggar nilai-nilai moral agama (Husaini, 2005). Pondok Pesantren harus memainkan perannya sebagai *cultural brokers* (pialang budaya) dan kemampuannya dalam mengontrol perubahan nilai (Tafsir, 2000;296).

Harapan masyarakat sangat besar jika pesantren mampu menjadi alternatif pembangunan yang berpusat pada masyarakat itu sendiri (*people centered development*) dan juga sebagai pusat pengembangan pembangunan yang berorientasi pada nilai (*value oriented development*) (Azra, 2019). Dengan demikian, banyak yang berharap pondok pesantren bukan hanya mampu bertahan tetapi lebih dari itu, dengan penyesuaian, akomodasi dan konsesi yang diberikannya, pondok pesantren juga seharusnya mampu mengembangkan diri, dan bahkan kembali menempatkan diri pada posisi yang penting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia secara nyata dewasa ini (Dhofier, 1985).

Jadi mau tidak mau, pondok pesantren mandiri harus mentransformasi di penyelenggaraan pendidikannya baik kurikulum maupun dalam metode pembelajarannya, walau tidak harus menghilangkan jati dirinya sendiri sebagai prinsip kemandiriannya (Mahduri, 2002). Sebab hal inilah, dalam menghadapi

perubahan yang begitu pesat, sekurang-kurangnya pesantren harus melakukan transformasi fundamental pada institusi dan kurikulumnya. Transformasi fundamental yang menambahkan orientasi institusi pendidikannya pada aspek peningkatan keterampilan peserta didiknya (Dawam Rahardjo, 1985). Sehingga pesantren menjadi tempat paling tepat untuk meningkatkan kualitas peserta didik baik aspek agama dan kecerdasan dalam menyelesaikan persoalan umat (Hasingsih, 2008).

Pondok Pesantren untuk mengembangkan kemandiriannya, harus juga memproduksi sumber daya manusia yang unggul. Dalam hal ini, menurut Tilaar dapat dilakukan beberapa hal. *Pertama*, pondok pesantren mampu untuk mengembangkan jaringan-jaringan kerjasama (*networking*). *Kedua*, kerjasama (*team work*). *Ketiga*, berkaitan erat dengan prinsip kerja sama tersebut, ialah cinta kepada kualitas yang tinggi. Pondok Pesantren yang unggul adalah pondok pesantren yang bisa mengembangkan dirinya dan melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pendidikan.

Keempat, perkembangan secara eksponensial pada ilmu pengetahuan telah mengubah prinsip-prinsip belajar manusia yang harus dilaksanakan seumur hidup. Salah satu tugas berat pesantren sebagai lembaga pendidikan adalah mampu melahirkan manusia belajar secara mandiri, sesuai dengan konsep pendidikan sepanjang hayat (Tilaar, 1990). Tentunya pada sisi ini juga sebagai upaya menyediakan sumber modal pengelolaannya.

Selain langkah-langkah yang diutarakan oleh para tokoh di atas. Sri Suyanta juga menyumbang gagasan tentang model kemandirian pondok pesantren salaf. Untuk membangun kemandirian pondok pesantren, rasa senasib dan sepananggung harus terjamin menjadi sikap seluruh civitas pesantren dalam kesehariannya. Sebab, Semangat gotong royong pada akhirnya melahirkan semangat kebersamaan yang tumbuh dan berkembang di kalangan para santri. Kebersamaan ini pada akhirnya memupuk kemandirian para santri yang belajar di pondok pesantren atau dayah tersebut.

Sri Suyanta juga menambahkan bahwa ada langkah-langkah tertentu untuk mengupayakan kemandirian pondok pesantren. Kemandirian pondok pesantren dapat diusahakan antara lain dengan cara: *pertama*, pesantren harus selalu menanamkan prinsip-prinsip kemandiriannya kepada civitas dayah atau pesantren dalam proses kegiatan belajar mengajar atau kurikulumnya. *Kedua*, pesantren perlu memberikan bekal berbagai macam *life skill* (ketrampilan) kepada santri/warganya, sampai ia mampu menerapkannya dalam keseharian. *Ketiga*, pesantren perlu memberikan bekal pengetahuan *leadership* (kepemimpinan) dan mengarahkan aplikasinya saat di dayah atau pesantren maupun setelah terjun di masyarakat. *Keempat*, pesantren perlu memberikan bekal pengetahuan *entrepreneurship* (kewirausahaan) bagi santri, agar bisa meningkatkan derajat ekonomi diri dan lingkungannya. *Kelima*, pesantren perlu membudayakan cara hidup yang penuh ikhtiar, tidak mengandalkan gaya hidup yang serba instan (Suyanta, 2012).

Semua pembahasan di atas, memberikan penjelasan bahwa ada beberapa aspek yang dapat menjadi unsur kemandirian pondok pesantren. Unsur-unsur itu secara terintegrasi membantu kemandirian ideal pondok pesantren salaf. Atau, dapat juga disebut sebagai unsur kemandirian penyelenggaraan lembaga pendidikan. Adapun unsur-unsur tersebut yaitu, unsur pembiayaan, unsur pengelolaan dan unsur SDM tersedia. Jika ketiga unsur tersebut dapat dilakukan dengan mandiri dan berkualitas, maka dimungkinkan sebuah pondok pesantren dapat dikatakan mandiri dalam penyelenggaraan pendidikannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut, *Pertama*, problematikan kemandirian pesantren adalah terletak pada kepemimpinan pesantren secara kaku, pembelajarannya dan disorientasi pondok pada realitas sosial. *Kedua*, elemen kemandirian terdiri dari kemandirian pendidikan, *life skill* (ketrampilan), *leadership*, *entrepreneurship* dan penuh ikhtiar. Seluruh hal demikian dapat dijadikan dasar dalam melihat secara holistik kemandirian pesantren salaf.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, A. (2006). *Pembaruan pesantren*. PT LKiS Pelangi Aksara.
- Ali, M., & Asrori, M. (2011). *Psikologi remaja: Perkembangan peserta didik*. Bumi Aksara.
- Arifin, I. (1993). *Kepemimpinan kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*. Kalimasahada Press.
- Arifin, M. (1981). *Kapita Selekta Pendidikan (Umum dan Agama)*. Toha Putra.
- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di tengah Tantangan Milenium III*. Prenada Media.
- Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy: The Exercise of Control* (1st edition). Worth Publishers.
- Bawani, I. (1993). *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*. al-Ikhlâs.
- Berzonsky, M. D. (1981). *Adolescent Development*. MacMilan.
- Bhatia, H. R. (2016). *A Textbook of Educational Psychology*. Laxmi Publications.
- Chaplin, J. P. (2011). *Kamus Lengkap Psikologi*. RajaGrafindo Persada.
- Dawam Rahardjo, M. (1985). *Pergulatan dunia pesantren: Membangun dari bawah*. P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat).
- Dhofier, Z. (1985). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. LP3ES.
- Gamage, D. (2006). *Professional Development for Leaders and Managers of Self-Governing Schools* (2006th edition). Springer.
- Hasingsih, S. (2008). Peran Strategis Pesantren, Madrasah, dan Sekolah Islam di Indonesia. *El-Tarbawi Jurnal Pendidikan Islam*, No. 1. Vol. 1.

- Hidayah, C. (2012). *Tantangan Pesantren Salaf*. Aksesinternet.
- Husaini, A. (2005). *Wajah peradaban Barat: Dari hegemoni Kristen ke dominasi sekular-liberal*. Gema Insani.
- Ismail, I. (2013). Menggagas Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam Masa Depan yang Mencerahkan. *Al-Ta'dib*, 6(1), 100–112.
- Mahduri, M. A. (2002). *Pesantren dan Pengembangan Ekonomi Umat: Pesantren al-Ittifaq dalam Perbandingan*. Depag RI.
- Marzuki, Santoso, B., & Ghofur, M. A. (2021). Penguatan Peran Pesantren untuk Membangun Pertahanan Umat Islam Indonesia di Era Society 5.0. *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)*, 3, 269–278.
- Mastuhu. (1994). *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. INIS.
- Oepen, & Karcher, W. (1988). *The Impact of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia*. P3M.
- Parker, D. K. (2005). *Menumbuhkan kemandirian dan harga diri anak*. Prestasi Pustakarya.
- Qomar, M. (2002). *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Erlangga.
- Rofiq, A., & Dkk. (2005). *Pemberdayaan pesantren: Menuju kemandirian dan profesionalisme santri dengan metode daurah kebudayaan*. Pustaka Pesantren kerjasama dengan Yayasan Kantata Bangsa.
- Solihin, M. (2016). *Modernisasi pendidikan pesantren: Studi kasus di Pesantren Darul Lughah Wal Karomah Kraksaan Probolinggo [Masters]*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Steenbrink, K. A. (1986). *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*. Dharma Aksara Perkasa.
- Sudibyoy, R. P. (2010). Integrasi, Sinergi Dan Optimalisasi Dalam Rangka Mewujudkan Pondok Pesantren Sebagai Pusat Peradaban Muslim Indonesia. *Jurnal Salam*, 13(2), Art. 2. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/465>
- Suyanta, S. (2012). Idealitas Kemandirian Dayah. *Jurnal Islam Future Ar-Raniri*, Volume XI, No. 2.
- Tafsir, A. (2000). *Metodologi pengajaran agama Islam*. Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H. A. R. (1990). *Pendidikan dalam pembangunan nasional menyongsong abad XXI (Cet. 1)*. Balai Pustaka.
- Wahid, A. (1998). Paradigma pengembangan Masyarakat Melalui Pesantren. *Jurnal Pesantren*, No.3 Vol V, 3.
- Wahid, K. A. (2001). *Menggerakkan Tradisi; Esai-Esai Pesantren*. Lkis Pelangi Aksara.

- Wolman, B. B. (1973). *Victims of success;: Emotional problems of executives*. Quadrangle.
- Ziemek, M. (1986). *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).